

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 Kabupaten/Kota, tidak semua kabupaten/kota tersebut memiliki penduduk mayoritas muslim. Salah satunya ialah Kecamatan Kabanjahe yang sering disebut Kota Kabanjahe. Pada 2020 jumlah penduduk Kota Kabanjahe sebanyak 73.581 jiwa, dengan kepadatan 1.643 jiwa/km². Kemudian, persentasi penduduk kecamatan Kabanjahe berdasarkan agama yang dianut yakni, Kekristenan 69,37% dimana Protestan 53,92% dan Khatolik 15,45%. Beragama Islam memiliki kenaikan menjadi 28,86% dan Budha 1,75%.¹

Kabanjahe merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Karo dan merupakan ibukota Kabupaten Karo, dimana mayoritas penduduknya ialah mayoritas non muslim. Kabupaten Karo umumnya adalah suku Karo yang menganut agama Kristen termasuk juga Kota Kabanjahe. Kabanjahe yang juga merupakan ibukota kabupaten karo di pimpin oleh seorang Bupati. Bupati yang dipilih setiap 5 tahun sekali sesuai masa jabatannya selama satu periode melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pemimpin ialah seseorang yang memimpin yang membawa perubahan dengan mempengaruhi orang lain agar dapat mengikuti kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sedangkan yang dipimpin ialah seseorang atau kelompok masyarakat yang siap melaksanakan guna mencapai tujuan bersama dengan cara bekerja sama dengan pemimpinnya.²

Sukses tidaknya seorang pemimpin bergantung terhadap sejahteranya kehidupan masyarakat yang dipimpin. Menjadi pemimpin bukan hanya sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan, jabatan, wewenang, dan dapat melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya, melainkan merupakan sebuah tugas mulia

¹Kecamatan Kabanjahe Dalam Angka 2021

²Aspizain Chaniago, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta : Penerbit Lentera Ilmu Cendekia 2017), h.2-3.

yang merupakan amanah yang diberikan Allah Swt kepada seorang hambanya dan akan dipertanggung jawabkan di akhbat kelak.

Dalam memilih pemimpin, setiap masyarakat memiliki hak memilih dan untuk dipilih yang telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan, “Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³ Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota sejak Indonesia merdeka hingga sebelum tahun 2005 dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada”. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada Juni 2015.⁴ Dimana dalam otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah.

Sesuai dengan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa bentuk pemerintahan yang diterapkan di Indonesia ialah bentuk pemerintahan Demokrasi. Dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dalam demokrasi juga memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Salah satu yang menjadi aspek penting dalam demokrasi ialah Partisipasi yaitu Partisipasi Masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan demokrasi tersebut.

³Panji Erawan, *MK : Hak Memilih adalah Hak Asasi Warga Negara*. Selasa, 18 Maret 2014 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9724> (diakses 22 Maret 2022).

⁴Gun Gun Heryanto, *Literasi Politik* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), h.178.

Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi dua, yakni memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi perilaku politik, tidak selalu berupa partisipasi politik.⁵

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan berorientasi pada proses *output*. Selain itu, terdapat pula sejumlah masyarakat yang tidak tergolong dalam kategori partisipasi aktif ataupun partisipasi pasif yang disebut apatis atau golongan putih (*golput*).

Dalam kenyataan, negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi (partisipasi politik) yang merupakan hak warga negara, persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara lain. Dengan kata lain, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Beberapa hal yang mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik yang menyangkut kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan sikap kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik).⁶

Dalam dunia Islam, proses penentuan seorang pemimpin yang dapat mengarahkan warganya merupakan suatu wacana yang sering menjadi pembicaraan. Salah satunya ialah menurut Dr. Anis Malik Thoah, bahwa dalam Islam, pemerintahan atau *khalifah* mencakup kepemimpinan agama dan dunia yang menggantikan Nabi Muhammad saw., sebagaimana yang dinyatakan para ulama. Maka dalam hal kepemimpinan ini tidak boleh menggantikan Nabi Muhammad saw, kecuali seorang Muslim. Adapun jabatan-jabatan selain pos-pos

⁵Kamaruddin Salim, Partisipasi Politik dan Dinamika Demokrasi. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol.4, No.1 Tahun 2019, h.198.

⁶Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2015), h.180-184.

yang kental dengan warna agama (selain pemimpin tentara dan peradilan) boleh dipercayakan kepada non-Muslim yang memang berkompeten.⁷

Allah Swt memerintahkan umat Islam untuk selalu berlaku adil dalam setiap permasalahan, ucapan, pekerjaan, budi pekerti dan kriteria lainnya ialah bertanggung jawab serta amanah karena segala perbuatannya akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak tidak hanya sebagai seorang pemimpin melainkan semua umat manusia. Ada beberapa kriteria pemimpin yang disampaikan dalam al-Qur'an, Allah Swt melarang hamba-Nya yang beriman untuk mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin karena mereka adalah musuh Islam dan musuh pada pemeluknya.⁸ *Memilih pemimpin non muslim diisyaratkan dalam al-Qur'an salah satunya dalam QS.al-Maidah/5: 51.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.⁹

Ayat ini secara tegas melarang kaum muslim menjadikan non muslim menjadi pemimpin mereka. Dalam ayat tersebut yang berbunyi “*barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka*”. Secara umum ayat diatas memberi peringatan kepada kita agar tidak menjadikan non muslim sebagai sahabat karib, apalagi mengangkat mereka sebagai pemimpin kita, baik dalam organisasi ataupun sebagai pemimpin Negara ataupun daerah. Karena mereka itu hanya bermuka manis

⁷Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, (Jakarta: Perpektif, 2005), h.260.

⁸Muhammad Zaini, Kriteria Pemimpin dalam Al-Qur'an dan Aplikasinya pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*. Vol. 6, No. 1, January-June 2021, h.51.

⁹Al-Qur'an, QS. Al-Maidah/5:51.

kepada kita, padahal dalam hati mereka membenci kita. Mereka senang kalau kita mendapat kesulitan, tetapi akan timbul kedengkianya kalau kita mendapatkan kesenangan. Sebagaimana diterangkan dalam QS. Ali-Imran ayat 120.¹⁰

*Sedangkan beberapa ulama berpendapat haram memilih pemimpin Non-Muslim. Beberapa ulama yang memberikan kelonggaran dengan memberikan syarat ketika dalam keadaan darurat maka dibolehkan. MUI, memberikan fatwanya bahwa memilih pemimpin Non-Muslim adalah hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat.*¹¹ Lebih baik pemimpin kafir tapi adil daripada muslim tapi korupsi terkesan berlebihan dan bertentangan dengan ayat tersebut. Padahal syarat keislaman mendahului syarat keadilan. Karena mengangkat pemimpin tidak bisa sembarangan, pemimpin akan membawahi sekian banyak aspirasi dan melayani sekian banyak orang dalam mengurus agama dan negara.¹² Syarat memilih pemimpin non muslim terdapat dalam Q.S At-Taubah/9 : 12.

وَأِنْ تَكُونُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَلِئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا
أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya : Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti.

Tafsir QS. At Taubah (9) : 12. Oleh Muhammad Quraish Shihab: Apabila mereka melanggar perjanjian yang mereka setuju sebelumnya, dan terus-menerus mencerca agama kalian, maka perangilah para pemimpin orang-orang yang sesat itu beserta pengikut-pengikutnya, karena mereka sebenarnya tidak memiliki perjanjian dan bukan orang yang berhak mendapat perlindungan, agar mereka berhenti dari kekufuran.

¹⁰ QS. Ali Imran/3:120.

¹¹ Sippah Chotban, Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim. *Jurnal Al-Qadau (Peradilan dan Hukum Keluarga Islam)*. Vol.5 No.1, Juni 2018. h.59.

¹² Reza Surya Pranata, *Memilih Pemimpin Non Muslim dalam Pandangan Masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Pematang Bandar*, (Skripsi UIN-SU 2018), h.5.

Dalam kondisi masyarakat muslim yang bertempat tinggal dikalangan mayoritas non-muslim akan memiliki pandangan berbeda terhadap pemimpin yang non-muslim karena adanya pengaruh lingkungannya yang dapat mengubah cara pandang mereka dan cara berpikir mereka. Hal ini sangat memungkinkan dapat mempengaruhi keikutsertaan ataupun partisipasi politik mereka sebagai seorang muslim untuk memilih pemimpin di kalangan mayoritas non muslim.

Pada umumnya, yang menjadi calon pemimpin adalah orang yang berasal dari kalangan non-muslim, sangat jarang ditemukannya pemimpin muslim yang ingin mencalonkan dirinya sebagai pemimpin yang mungkin disebabkan karena kurang percaya diri terhadap dirinya sendiri, terlalu pesimis sebelum mencoba, dan kurangnya persatuan dukungan sesama umat muslim itu sendiri di kalangan mayoritas non-muslim tersebut. Sehingga seorang pemimpin yang pernah menjabat menjadi kepala daerah sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kota Kabanjahe merupakan seorang non-muslim. Dengan ini, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian skripsi yang bertemakan pemimpin non muslim. Dapat dikatakan penduduk muslim yang ada di daerah ini hanya sedikit, tidak mencapai setengah bagian dari penduduk non-muslim yang ada. Terkait hal ini, penulis ingin mengetahui dan melihat partisipasi masyarakat muslim dan cara pandang mereka terhadap pemimpin non muslim dan pemimpin yang seharusnya mereka pilih dalam kondisi yang ada serta disesuaikan dengan aturan agama Islam yang mereka ketahui.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan membuat rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat muslim Kecamatan Kabanjahe terhadap pemimpin non muslim?
2. Bagaimana Partisipasi masyarakat muslim Kecamatan Kabanjahe terhadap pemilihan pemimpin di kalangan mayoritas non muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pandangan masyarakat Muslim kecamatan Kabanjahe terhadap pemimpin non muslim.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana partisipasi masyarakat muslim Kecamatan Kabanjahe terhadap pemilihan pemimpin di kalangan mayoritas non muslim.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dibuat agar memberikan manfaat dan berguna untuk umum, mana terangkum dalam :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan informasi tentang pandangan masyarakat muslim terhadap pemimpin non muslim.
 - b. Melihat bentuk partisipasi ataupun kontribusi masyarakat muslim terhadap pemilihan pemimpin non muslim
 - c. Memperoleh nilai-nilai tentang pemimpin menurut ajaran Islam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang akan dilakukan.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan terhadap partisipasi dan pandangan masyarakat muslim terhadap pemimpin yang berasal dari kalangan non muslim.
 - c. Memberikan wawasan dan makna kepada para pemilih untuk memilih pemimpin yang seharusnya.

E. Batasan Istilah

Apabila dilihat menurut sudut pandang penafsiran seorang terhadap suatu istilah itu berbeda-beda. Sehingga menghindari kesalahan pengertian mengenai kata-kata pada penelitian ini, maka penulis akan memaparkan dan menjabarkan satu persatu istilah tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.¹³ Dalam hal ini partisipasi yang dimaksud memberikan dorongan untuk keterlibatan atau ketersediaan memberi suatu sumbangan dengan kesukarelaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2. Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu system hidup bersama.¹⁴ Masyarakat muslim merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri karena dapat dikatakan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama dan terkhusus menganut agama yang sama dalam kehidupan mereka.
3. Partisipasi Masyarakat menekan pada partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Dimana hal ini merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka, yang mana sebagai contohnya ialah menggunakan hak pilih mereka dengan memilih seorang pemimpin seperti Bupati beserta wakilnya di satu kabupaten.¹⁵
4. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada yang dilakukan di Kabupaten untuk memilih seorang bupati beserta wakilnya yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah itu sendiri.

¹³Herman, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol.1 No, 2019, h.78.

¹⁴Irwansyah, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.1, Januari 2020, h.164.

¹⁵Herman, Tingkat Partisipasi..., h.79.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan penelitian. Oleh karena itu, pada saat membahas proposal, metode, dan langkah-langkah berikut akan digunakan untuk mendapatkan bahan dan informasi yang akurat :

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat atau menggunakan pendekatan deskriptif. Narbuko dan Achamdi memberikan pengertian, penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang ada, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.¹⁶ Menurut Hadari Nawawi, mengungkapkan yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.¹⁷

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Kabanjahe. Kota Kabanjahe ini penulis pilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan penelitian awal, Kota Kabanjahe merupakan salah satu kecamatan yang masyarakat muslimnya sangat minim dan terdapat di kalangan mayoritas non muslim. Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat muslim dalam pemilihan kepala daerah di kalangan mayoritas non muslim.

3. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan informan sebagai satu-satunya sampel yang diketahui. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah penelitian yang ada. Penulis menggunakan pendekatan *purpose sampling* dalam hal ini. *Purpose*

¹⁶Achmadi dan Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.44.

¹⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007). h.33.

sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan kondisi khusus yang ditetapkan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian.¹⁸ Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Karo
- b. BPS Kabupaten Karo
- c. Pejabat Pemerintahan Kecamatan Kabanjahe
- d. Tokoh Masyarakat
- e. Tokoh Agama
- f. Mahasiswa
- g. Masyarakat Muslim Umum



4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui pengamatan langsung atau observasi terhadap objek penelitian, serta melalui wawancara dengan informan mengenai masalah penelitian, disebut sebagai data primer. Sedangkan data sekunder berupa data berbentuk angka dan deskripsi data. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai berikut: literatur yang berkaitan dengan judul penelitian, seperti dokumen atau bahan dari ketua KPU, BPS, dan Kabanjahe kecamatan, serta karya tulis ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Penulis penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berikut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Kuesioner
- d. Dokumentasi

¹⁸ Nawawi, *Metode Penelitian...*, h.31.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang terdiri dari informasi lisan dan tertulis bukan daripada data numerik data untuk memudahkan menyaring data yang tidak diperlukan. Penulis menggambarkan data dalam bentuk teks agar lebih mengerti. Setelah mengetahui data penulis kemudian menjawab pertanyaan penelitian dengan menarik kesimpulan dari data analisis yang sudah ada. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meneliti lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi;
- b. Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang berasal catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk menentukan informasi mana yang relevan dengan masalah penelitian dan mana yang tidak.
- c. Penyajian data Setelah reduksi data, penyajian data (*display*) merupakan langkah selanjutnya dalam analisis. Data disajikan sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk menemukan informasi yang kurang penting dengan mengaturnya dalam pola hubungan. Deskripsi naratif adalah salah satu cara agar data dapat disajikan. Peneliti mencoba untuk mengumpulkan data yang relevan dalam langkah ini sehingga dapat dikatakan dan memiliki makna tertentu. Untuk menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian, prosesnya dapat dilakukan dengan menampilkan dan menghubungkan fenomena. Penyajian data yang baik merupakan langkah penting menuju analisis kualitatif yang valid dan dapat dipercaya.
- d. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.¹⁹

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2013), h.244.

6. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada penelitian ini peneliti menguji kepercayaan terhadap data hasil penelitian melalui triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data yang mana menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda yang akan menghasilkan pandangan berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.²⁰

G. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini yang menjadi inti pembahasan adalah kajian tentang partisipasi dan cara pandang masyarakat muslim terhadap pemilihan pemimpin di kalangan mayoritas non muslim. Dari hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terkait tema yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut :

Pertama adalah karya tulis Skripsi : Reza Surya Pranata yang dimuat dalam skripsinya yang berjudul “Pemimpin Non Muslim Perspektif Masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Pematang Bandar”. Penulis tersebut membahas mengenai pandangan masyarakat Desa Kandangan terhadap kepemimpinan kepala daerah yang non muslim di lingkungan mayoritas muslim.

Kedua adalah karya tulis Skripsi : Ilham yang dimuat dalam skripsinya yang berjudul “Respons Kelompok Muslim Terhadap Kepemimpinan Non Muslim (Studi Kasus di Kelurahan Lenteng Agung Periode 2013-2014). Penulis tersebut membahas mengenai tanggapan dan pendapat kelompok muslim terhadap pemimpin yang non muslim di Kelurahan Lenteng Agung pada 2014.

Ketiga adalah karya tulis Jurnal : Hasse J yang dimuat dalam jurnalnya yang berjudul “Respons Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim

²⁰*Ibid.*, h.241.

di Indonesia”. Penulis tersebut membahas tentang kecenderungan kelompok yang menolak secara tegas kepemimpinan non muslim, kecenderungan kelompok yang menerima, dan kelompok cenderung menerima dengan syarat-syarat tertentu.

Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu membahas tentang respons atau tanggapan masyarakat mayoritas muslim terhadap pemilihan pemimpin non muslim dan hukumnya memilih pemimpin non muslim, sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas tentang Pandangan Masyarakat Muslim pada Pemilihan Pemimpin di kalangan mayoritas non muslim.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan menjelaskan secara garis besar penyusunan skripsi ini, maka penulis akan memberikan sistematikanya, sebagai berikut :

BAB I berisi tentang Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang Gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat, letak geografi, pemerintahan, kependudukan, dan struktur organisasi Kecamatan Kabanjahe.

BAB III berisi tentang Kajian Teori yaitu teori tentang partisipasi, pemilihan kepala daerah, dan konsep kepemimpinan dalam Islam.

BAB IV berisi tentang inti pembahasan skripsi ini yang mencakup tinjauan terhadap hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat muslim terhadap pemimpin non muslim, Pemilihan Kepala Daerah di kalangan mayoritas non muslim, dan partisipasi masyarakat muslim terhadap pemimpin non muslim serta Pemilihan Kepala Daerah di kalangan mayoritas non muslim.

BAB V berisi tentang Penutup yang memuat berupa kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan beberapa saran yang dapat membangun.